

Modernisasi Dan Pengaruh Sekularisasi Di Tunisia

Rahma Salbiah, Intan Wahyuni, Nauwal Aufa

Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Washliyah, Banda Aceh
Ez-Zitouna University, Makqal Zaim, Tunis, Tunisia
20201012003@student.uin-suka.ac.id, intanwahyuni.997@gmail.com
nauwalaufa@gmail.com

Abstrak:

Tunisia merupakan negara yang terletak di ujung utara benua Afrika, memiliki posisi geopolitik yang strategis sebagai penghubung antara Afrika dan Eropa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan modernisasi yang terjadi di Tunisia, adanya pembaharuan-pembaharuan baru setelah terjadinya Arab Spring. Dalam konteks perkembangan modernisasi dan modernitas, pemerintah memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat dengan beberapa alasan, seperti alasan politik, ekonomi, sosiologis dan alasan hukum. Habib Bouguiba adalah salah satu pengasas serta presiden yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Tunisia. Banyak gagasan Bouguiba yang membuat Tunisia semakin berkembang dari berbagai sektor. Tunisia merdeka karena protektorat Perancis dan terjadinya modernisasi berkat kontribusi dan partisipasi Burguiba dalam menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam negara. Namun, beberapa kebijakan pemerintah sejak kemerdekaan cenderung mengarah pada proses sekularisasi Tunisia dan meminggirkan peran agama. Dampak dari modernisasi memiliki dua sudut pandang, secara positif dan negatif. Sebagian pembaharuan yang terjadi di Tunisia juga dipengaruhi oleh kebudayaan Perancis, salah satunya tentang gaya berpakaian dari masyarakat Tunisia yang sebagian tidak berhijab lagi.

Kata Kunci: Modernisasi, sekularisasi, Arab Spring

Abstract:

Tunisia is an independent country located at the northern tip of the African continent. Tunisia occupies a very strategic geopolitical position as a link between Europe and Africa. This article discusses the development of modernization that has occurred in Tunisia, the existence of new reforms after the Arab Spring. In the context of the development of modernization and modernity, the government aims to regulate society for several reasons, such as economic, political, sociological and legal reasons. Habib Bouguiba was one of the founders and presidents who played an important role in the development of Tunisia. Many of Bouguiba's ideas have made Tunisia increasingly developed from various sectors. Tunisia was able to become independent from the French protectorate, as well as experiencing modernization, thanks to the great contribution of Habib Burguibah. Various government policies since independence have tended to lead to the process of secularizing Tunisia and marginalizing the role of religion. The impact of modernization has two perspectives, positively and negatively. Some of the reforms

that occurred in Tunisia were also influenced by French culture, one of which was the dress style of the Tunisian people, some of whom did not wear the hijab anymore.

Keywords: Modernization, secularization, Arab Spring

A. Latar Belakang

Musim semi Arab atau yang sering disebut dengan Arab Spring adalah suatu gerakan dari rakyat dengan beragam pekerjaan yang membutuhkan adanya suatu perubahan besar dalam kehidupan mereka menjadi lebih baik di sebuah negara. Berdasarkan keadaan mereka saat itu yang tidak memiliki arah yang jelas seperti, melemahnya perekonomian, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kesenjangan sosial semakin melebar, dan kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya dikenal musim semi Arab, Arab Spring juga dikenal dengan perubahan pemerintah yang demokratis inginkan, sistem terbuka, keadilan, memiliki kebebasan dalam berpendapat, dan transparan.¹

Tunisia adalah negara yang mampu membangun demokrasi pasca-Arab Spring, tidak hanya itu, Tunisia juga pernah diserang oleh aksi sektarian. Terjadinya pengeboman dan pembunuhan dengan mengikuti politik didalamnya berlangsung pada tahun 2013, diantaranya pembunuhan Mohamed Brahmi yang merupakan tokoh oposisi kiri, 8 tentara dibunuh di daerah perbatasan Tunisia dan Aljazair, dan pengeboman pada patroli Garda Nasional serta pelabuhan La Goulette. Ketegangan dan krisis politik terjadi antara partai Ennahda dan partai sekuler, pemimpin koalisi pemerintahan; ditambah lagi dapat mendukung gerakan Salafi yang ekstrim.²

Setelah rezim otoriter dijatuhkan di beberapa titik negara Arab, seperti Tunisia, Libya, Yaman, dan Mesir tidak langsung dijamin kestabilan keamanan dipulihkan dengan cepat. Hal tersebut berdampak tidak baik terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kebebasan yang diciptakan disebabkan oleh proses demokrasi yang berlangsung dapat menimbulkan problematika baru, serta perblokan mengenai sekte semakin menguat dan menyebar. Setiap sekte memperebutkan kemenangan dengan beragam cara yang terkadang tidak masuk akal. Adapun kelompok sebelumnya sangat kontra dengan demokrasi, mereka hanya mempergunakan demokrasi untuk kemenangan pribadi dan kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Sekterianisme merupakan sebuah problematika yang dihadapi oleh pasca Arab Spring dalam mewujudkan demokrasi dengan berbagai tantangan yang ada.³

Pasca revolusi, masyarakat Tunisia, terutama golongan perempuan berupaya keluar dari penindasan yang mereka hadapi dan terus bersuara, serta memainkan peranan aktif dalam proses pembuatan legislasi agar dapat mengakomodasi kepentingan perempuan, di sinilah peran dari *state feminism*. Di satu sisi, *state feminism* atau upaya

¹Rinawati Acan Nurali, *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, PANRITA Journal of Science, Technology, and Arts, Vol. 1, No. 1, 2021, 6.

²<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/15/dari-zaitunah-untuk-dunia-dan-budaya-tidak-berhijab-di-tunisia>

³Rinawati Acan Nurali, *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, PANRITA Journal of Science, Technology, and Arts, Vol. 1, No. 1, 2021, 8.

pemerintah/negara untuk mendukung feminisme dan perlindungan yang lebih besar terhadap perempuan telah membuat Tunisia menjadi sebuah negara yang mengangkat kedudukan wanita melalui perubahan mekanisme perundangan yang disebut *Code of Personal Status* (CPS). Keberadaan CPS merupakan kemajuan besar bila dibandingkan dengan negara-negara Arab-Muslim lainnya. *State feminism* merupakan faktor semakin menguatnya wacana hak asasi dan kedudukan perempuan pasca revolusi Arab Spring di Timur Tengah.⁴

Para aktivis perempuan Islamis juga menyuarakan pendapat mereka. Aktivis Partai Ennahda, termasuk diantaranya Soumaya Ghannouchi, yang dengan tegas mengaitkan revolusi dengan pembebasan perempuan. Revolusi Arab Spring sesungguhnya tidak hanya telah menghancurkan struktur despotisme sampai ke akarnya, namun juga merobohkan mitos selama beberapa dekade. Dalam hal ini, persepsi perempuan Arab sebagai golongan yang tidak berdaya dan diperbudak, serta memaksa harus berdiam diri di penginapan serta tidak ikut campur tangan dalam urusan politik perlu dilawan.⁵

Pada masa Ben Ali, terjadi kebijakan yang paradoks. Awalnya, Ben Ali diharapkan bersikap tidak terlalu sekuler karena dia terlihat dekat dengan kalangan Islamis. Dia juga memanfaatkan simbol dan metafora Islam lebih besar dibandingkan pada masa rezim Bourguiba. Bahkan, dia juga menyampaikan pidato mengenai identitas Muslim Arab dan mengalahkan pengaruh media massa Islam lewat pendirian stasiun radio Zitouna. Terkait isu feminisme, kebijakan sekuler Ben Ali melibatkan feminis elit yang tertarik dalam politik selama masa pemerintahannya. Pasca tumbangannya Ben Ali, kaum perempuan yang tidak memiliki afiliasi politik juga menyadari pentingnya peran dan kontribusi mereka dalam upaya membangun kembali negara yang carut-marut. Para perempuan Tunisia pasca kepergian Ben Ali, baik dari kalangan sekuler maupun Islamis mengambil keuntungan dari ruang publik. Berbagai usaha dan upaya para feminis yakni melakukan pertemuan, demonstrasi, dan pembentukan asosiasi feminis, serta mendirikan struktur partai, di mana tujuannya untuk memasukkan hak-hak perempuan ke dalam konstitusi baru. Dari situasi tersebut, revolusi Arab Spring telah memberdayakan perempuan Tunisia dalam mendefinisikan kembali posisi mereka dalam lanskap politik dan sosial di Tunisia.⁶

Pada tahun 2011, delapan tahun selama terjadinya gelombang Arab Spring beberapa negara Timur Tengah masih ada perang saudara dan konflik internal. Masyarakat Timur Tengah memiliki cita-cita untuk mencapai perubahan positif di berbagai sektor kehidupan, adapun negara-negara tersebut seperti Mesir, Tunisia, Libya, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Suriah dan Yaman menginginkan negara yang lebih adil, demokratis, serta makmur. Akan tetapi, hambatan akibat pengaruh sektarianisme membuat proses demokrasi melambat. Proses demokratisasi terjadi di Tunisia dengan menunjukkan perubahan positif, yang mana berbagai indikator demokrasi semakin diakomodasi, seperti kesetaraan gender dan kebebasan berpolitik. Beberapa partai yang

⁴Ayu Maulida Alkholid, Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah State Feminism, Jurnal ICMES Volume 5, Nomor 2, Desember 2021, 217.

⁵Ayu Maulida, Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring, 220.

⁶Ayu Maulida, Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring, 19.

memiliki kedudukan tinggi di Tunisia telah berhasil beradaptasi dan tidak ikut serta dalam dikotomi sektarian..⁷

Perjuangan masyarakat Tunisia untuk mendapatkan kembali hak berpolitik dengan berlandaskan pada Islam yang didalamnya terdapat sistem-sistem demokrasi melalui jalan yang sangat terjal dan panjang. Meski demikian, masyarakat Tunisia membuktikan bahwa mereka bisa bergerak dan meruntukan kekuasaan yang dimiliki pemerintah yang hanya memikirkan diri sendiri, zolim kepada masyarakat kecil, menganiaya mereka yang tidak menuruti kemauan pemerintah, dan menghilangkan hak-hak masyarakat kecil.

Beberapa penelitian yang terdapat kesamaan baik dalam aspek objek material, objek formal, dan kajian teori. Artikel dengan judul “Peran Jejaring Sosial dalam Revolusi Tunisia” yang ditulis oleh Sven Pohle, di Deutsche Welle artikel ini dimuat. Berdasarkan tulisannya, Sven Pohle menjelaskan peran media sosial seperti, Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya mempunyai peran penting. Revolusi di Tunisia memiliki kaitan erat dengan beberapa media tersebut, karena media tersebut memberi pengaruh positif di revolusi Tunisia atau sering disebut sebagai “revolusi media sosial”. Namun, menuai pro-kontra terhadap pernyataan tersebut, tidak semua pengamat menyetujuinya.

Artikel yang berjudul “The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During The 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions” ditulis oleh Gilad Lotan. Artikel ini dimuat di Internasional Journal of Communication 5. Tidak hanya itu, penulis artikel ini ada beberapa orang, yaitu Erhardt Graef, Mike Ananny, dan Devin Graffney. Artikel ini membahas mengenai revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, gerakan perubahan yang dilewati oleh kedua negara ini melalui media sosial, salah satunya Twitter. Sesuatu hal yang baru bagi Kawasan Timur Tengah melalui revolusi yang diupayakan, sehingga tidak ada lagi pemerintahan yang diktator. Pada 17 Desember 2010, adanya protes dari seorang pedagang sayur bernama Mohammed Bouazizi yang mengupayakan diri untuk berdiri di depan gedung dengan melakukan aksi bunuh diri dan membakar dirinya hingga masuk Rumah Sakit dan meninggal disana.

Skripsi yang berjudul “Demokratisasi Tunisia dan pengaruhnya terhadap negara-negara Arab” ditulis oleh Faizal Musada Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif, adapun data yang dikumpulkan hanya data sekunder. Penelitian ini membahas mengenai demokrasi yang terjadi di Tunisia yang disebabkan oleh politik dan ekonomi. Ekonomi Tunisia mengalami keterpurukan, sehingga banyak pengangguran dan tingkat hidup rendah. Tidak hanya itu, politik di Tunisia dipimpin oleh Ben Ali dengan pemerintahan yang otoriter, nepotisme, dan korupsi uang negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mengenai faktor-faktor demokrasi yang terjadi di Tunisia. Selain itu, Tunisia juga negara yang dapat mempengaruhi negara Timur Tengah lainnya untuk bisa lebih maju dan mengupayakan revolusi guna untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan Timur Tengah.

⁷Sainul Rahman, Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Kasus Tunisia dan Yaman, Jurnal ICMES Volume 3, No. 1, Juni 2019,116.

Rinawati Acan Nurali mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis artikel dengan judul “Perkembangan Demokrasi di Tunisia”, dalam artikelnya menuliskan mengenai perkembangan Tunisia menjadi negara pertama yang melakukan revolusi terhadap hal yang masih mengalami keterbelakangan. Adapun hasil penelitiannya adalah negara Tunisia yang sudah mampu menyelenggarakan pemilu (pemilihan umum) guna memilih seorang pemimpin secara demokratis. Tunisia mengalami perubahan yang sangat meningkat di berbagai sektor, konstitusi baru diresmikan membuat kondisi Tunisia semakin membaik dikarenakan memberikan kesetaraan gender. Hal tersebut membuat Tunisia dikenal menjadi pionis feminisme di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan pandangan modernisasi, segala bentuk reformasi dalam Islam merupakan reformasi dari atas. Sedangkan perubahan hukum di negara Islam merupakan bentuk inisiatif dari negara/pemerintahan. Perwujudan dari keinginan suatu negara dalam mengatur masyarakat Islam yang masih kuat memegang teguh hukum Islam, banyak negara Islam yang mewujudkan reformasi huku dengan beberapa faktok penyebabnya seperti, politik, ekonomi, sosiologi, serta alasan hukum sendiri. Berdasarkan proses berkembangnya, hasil dari reformasi hukum harus melalui persetujuan masyarakat. Namun, semua harus dibatalkan dikarenakan tidak mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri. Jatuhnya penguasa yang menggagas reformasi dan tidak adanya kesesuaian reformasi menjadi suatu penyebab dihentikannya reformasi hukum Islam. Menurut pandangan Robert Seidman, ada hukum yang memang tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, semua perlu dipertimbangkan berdasarkan tradisi hukum dan pentingnya hukum masyarakat, sehingga dengan demikian hasil dari reformasi hukum bisa diterapkan tanpa harus dianulir.⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses modernisasi di negara Tunisia sebagai salah satu negara Timur Tengah yang mengalami perkembangan pesat dibanding negara-negara lainnya. Ini menjadi suatu contoh yang baik bagi negara Timur lainnya untuk bisa berpikiran terbuka terhadap perkembangan zaman. Tentunya dalam perkembangan terdapat sisi negatif dan positifnya dari keadaan yang biasanya, ini bukan menjadi sebuah penghalang untuk memajukan negara Tunisia. Tidak hanya itu, pengaruh sekularisme juga menjadi proses dalam perkembangan dari negara Tunisia dan banyak bermunculan suatu hal yang baru juga. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap negara yang mengalami proses perkembangan dengan berbagai perubahan positif dan negatifnya.

Proses perkembangan modernisasi yang terjadi di Tunisia melahirkan pembaharuan-pembaharuan terbaru. Tunisia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Perancis, sehingga masih ada kebudayaan yang berarah pada negara tersebut. Pasca Arab Spring banyak membawa perubahan yang pesat terhadap perkembangan sosial, politik dan pendidikan. Namun tidak bisa dipungkiri sesuatu yang baru akan menghasilkan dampak negatif juga bagi masyarakat. Adapun tulisan ini akan menjelaskan perkembangan Tunisia dan proses modernisasi yang terjadi dan pengaruh sekularisasi di Tunisia.

⁸Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014, 18.

B. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Tunisia

Afrika Utara adalah sebuah daerah terjadinya penyebaran Islam di daratan Eropa, walaupun perjuangannya melalui beberapa rintangan dan tantangan. Islam adalah agama pertama di kawasan ini, problematika perpolitikan yang disebabkan oleh orang Barbar dan Romawi yang mengalami pemberontakan secara bergantian. Ketika sekelompok nonislam menginginkan kekuasaan di Andalusia, saat itu pula pengungsi yang ada di Arab berpindah ke Afrika Utara. Masyarakat Arab tersebut membentuk perkampungan Andalus di Tunisia., sebagian rakyat Spanyol yang bermata pencarian petani perkebunan, penggilingan, irigasi, dan kebun anggur. Adapun mereka orang-orang migran diberi hak otonom dalam membentuk juru bicara dan mengumpulkan pajak.⁹

Arab berdasarkan termologinya memiliki wilayah-wilayah tergolong dalam Afrika Utara seperti; Cyenacia, Tunisia, Libya, Tropolitania, dan lembah sungai Nil bagian bawah yang sering disebut al-Misir (Mesir Modern). Semua tempat yang disebutkan disebut Afrika, dan daerah Aljazair dan Maroko yang sering disebut dengan sebutan al-Maghribi. Berdasarkan historis kehidupan sosial Afrika Utara pada masa lalu adalah memiliki rakyat desa yang masih kesukuan, nomaden, dan patriarki. Berdasarkan pandangan Ira M. Lapidus negara Tunisia, Libya, Aljazair, dan Maroko adalah termasuk wilayah Afrika Utara.¹⁰

Islam disebarkan di negara Tunisia tak bisa diabaikan begitu saja, pertama kali ekspedisi Arab zaman Khalifah Usman bin Affan terjadi di Tunisia tahun 650. Berhasilnya tentara Arab mengalahkan Bizantium Patrice Gregoire di wilayah Sbeitla dalam masa pimpinan komando Abdullah bin Sa'ad. Terjadi serangan kedua kalinya yang dipimpin oleh Mu'awiya Ibn Hudaij tahun 666 pada zaman khalifah Umayyah. Pada tahun 667 kota Sousse, Pulau Djerba, dan Bizerte diambil oleh Mu'awiya I.¹¹

Tunisia di modernisasikan oleh Habib Bourguiba 30 tahun lamanya, ditandai dengan kebangkitan Islamisme serta klientelisme. Digulingkannya Habib Bourguiba oleh Zine El-Abidine Ben Ali perdana Menteri pada tahun 1987. Pada pemerintahan Ben Ali memiliki target utama "bourgubisme" serta meliberalisasikan ekonomi. Akan tetapi, pada saat itu Ben Ali sebagai presiden yang memiliki sikap koruptif dan otoriter. Kepemimpinan Ben Ali tidak bertahan lama, Ben Ali dilengserkan oleh revolusi rakyat.¹²

Gelombang aksi massa Arab Spring 2011 dimulai dari Tunisia hingga menyebar ke berbagai negara lainnya di kawasan Timur Tengah. Awal mula munculnya Arab Spring di Tunisia dipicu oleh protes yang dilakukan oleh seorang pedagang buah, Mohamed Bouazizi dengan cara membakar diri. Aksi Bouazizi merupakan tindakan protes terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan Zine El

⁹Vita Ery Oktaviyani, *Islam Di Afrika Utara*, Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Vol. 3, No. 1, 2019, 1.

¹⁰Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2012, 237.

¹¹Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, 237.

¹²<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/12/tunisia-sejarah-dan-pengaruh-revolusi-melati-pada-dunia-arab>

Abidine Ben Ali. Pasca terjadinya Arab Spring, konstelasi politik di Tunisia menunjukkan adanya pengembangan yang cukup baik. Negara lain yang mengalami Arab Spring, Tunisia dianggap satu-satunya yang sukses dalam transisi politik. Kondisi ini dinilai sebagai “*the only success story among the revolutionary states*”. Tunisia menunjukkan transisi politik dari *politics from above* menuju *politics from below*.¹³

Tunisia bangkit dan memperbaiki kualitas demokrasi pasca kepemimpinan Ben Ali. Konstitusi baru disepakati oleh Majelis Nasional Tunisia yang dianggap sebagai perealisasi impian masyarakat Tunisia dalam penegakan demokrasi berlangsung pada Januari 2014. Akibat dari perundang-undangan baru membuat Tunisia semakin progresif dalam banyak sektor. Perundang-undangan terbaru adanya jaminan kesamaan hak bagi wanita dan pria, presiden dan perdana menteri mendapat pembagian kekuasaan eksekutif. pembagian kekuasaan eksekutif antara perdana menteri dan presiden, dan menuntut negara mengatasi terkait masalah korupsi. Arab Saudi memiliki peraturan baru yang berbeda dari sebelumnya, sudah adanya aturan terkait kebebasan serta perempuan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksekusi diri di ranah publik, yaitu masuk stadion olahraga, mengemudi, menonton bioskop, serta banyak peraturan mengenai perempuan yang sudah disepakati sejak tahun 2018. Berbanding terbalik dengan Tunisia, dulu negara ini sudah mengakui hak-hak asasi perempuan. Pada 20 Maret 1956 Tunisia sudah merdeka dari penjajahan Prancis. Tunisia telah mengadopsi hukum Kode Status Personal mengenai perlindungan perempuan dan hak-haknya dalam pernikahan, seperti melarang perkawinan usia dini, melarang cerai tanpa melalui pengadilan, dan melarang poligami yang ditetapkan pada 13 Agustus 1956. Peringatan pada tanggal 13 Agustus saat itu menjadi peringatan Hari Perempuan Nasional.

Peristiwa Arab Spring merupakan titik balik bagi Tunisia. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin negara yang bersifat otoriter, korup, dan diktator. Mohammad Bouazizi merupakan pedagang buah yang melakukan aksi bunuh diri dengan membakar diri sendiri dan akhirnya memicu ketegangan yang membuat Presiden Ben Ali tumbang setelah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Kaum perempuan dari kalangan Islamis juga berperan dalam aksi-aksi demo ini karena sejarah panjang represi yang mereka alami. Rezim Zine El Abidine Ben Ali menolak adanya partai politik yang mengatasnamakan agama seperti halnya Partai Ennahda. Banyak aktivis politik Ennahda yang dipenjara dan sebagian lainnya melarikan diri ke Eropa untuk mendapatkan perlindungan politik. Represi terhadap aktivisme Islam inilah yang menjadi motivasi bagi para perempuan yang berhaluan Islamis untuk ikut berjuang menolak rezim Ben Ali. Mereka juga memiliki inisiatif pribadi dan saling memberikan bantuan selama proses revolusi ini, seperti membantu menyediakan sumber makanan untuk para masyarakat yang terdampak akibat demonstrasi massa.¹⁴

Tokoh yang berhasil menjatuhkan rezim otoriter di negara Tunisia adalah Muhammad Bouazizi. Bouazizi melakukan self Immolation atau sering disebut aksi bakar diri menjadi suatu aksi yang mendapatkan tanggapan dari beberapa pemberitaan media

¹³Ayu Maulida Alkholid, *Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah State Feminism*, Jurnal CMES, Vol. 5, No. 2, 2021, 210.

¹⁴Ayu Maulida Alkholid, *Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring*, 210.

hingga ranah internasional. Akibatnya, rezim Ben Ali terpaksa mundur karena terjadinya demonstrasi besar-besaran di Tunisia. Mitos yang beredar tidak mematahkan semangat Bouazazi dalam menjatuhkan rezim diktator, dia berhasil menepis ketakutan yang lama dirasakan masyarakat Tunisia untuk melawan penguasadiktator yang telah dhalim.¹⁵

Revolusi Melati (*Tsawrah al-Yasmin*) adalah sebutan atas terjadinya pelengseran Ben Ali yang melahirkan Revolusi Tunisia. Revolusi Melati adalah sebuah revolusi yang tidak mengandung aksi kekerasan. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada Desember 2010 dan Januari 2011 menyebabkan presiden Zine el-Abidine Ben Ali mundur dari pemerintahan yang sudah berkuasa sejak 1987.

Tunisia berhasil menjadi inspirasi bagi dunia Arab akan revolusi mereka, sehingga timbul protes dari berbagai negara lain seperti; Mesir, Libia, Yaman, Suriah, dan Bahrain. Akibat dari protes ini, banyak tokoh otoriter yang digulingkan, seperti Hosni Mubarak, Muammar Gadafi, dan Ali Abdullah Saleh. Tidak hanya itu aksi demo juga terinspirasi dari Tunisia juga dilakukan oleh Maroko, Irak, Aljazair, Lebanon, Jordan, Kuwait, Oman, dan Sudan. Protes kecil-kecilan guna mencapai kesejahteraan rakyat juga terjadi pada Palestina, Saudi Arabia, Djibouti, Mauritania, dan Gurun Sahara Maroko. Adapun slogan yang ramai saat demonstrasi dengan bunyi; "*asy-Sya'bu yurid isqat al-nizham*" (rakyat ingin meruntuhkan rezim), hal itu disebabkan oleh mayoritas para penguasa yang bertindak sebagai korup dan otoriter. Tunisia mampu menjadi teladan bagi semua orang di dunia Arab.

2. Pengaruh Budaya Asing terhadap Perkembangan Tunisia

Tunisia adalah negara yang memiliki luas 163.610 km² dengan jumlah penduduk 10.982.754 jiwa, diperkirakan masyarakat Tunisia memiliki presentase 99% beragama Islam. Tunisia dijajah oleh Prancis diperkirakan 75 tahun lamanya, sehingga Tunisia meraih kemerdekaan pada 20 Maret 1956. Walaupun sudah merdeka, tetapi kepengaruhan dari Prancis tetap mengakar dalam kehidupan masyarakat Tunisia.¹⁶ Tunisia dikenal dengan lumbung peradaban Islam, sehingga jika ingin belajar mengenai moderasi dan peradaban Islam sangatlah menarik. Tunisia merupakan negara dengan simbol peradaban besar pada masanya.

Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi atau sering disebut "Gus Dubes" mengunjungi Avenue Habib Bourguiba, yang merupakan Jantung Kota Tunis. Dulu dimulai dari tempat inilah revolusi Arab Spring bergulir dengan kejatuhan presiden Tunisia Rezim Bin Ali pada tahun 2011, yang telah berkuasa 23 Tahun. Kemudian revolusi itu merambah ke berbagai negara Arab. Mengunjungi tempat yang bersejarah ini ternyata sangat mengagumkan, suasanaanya mirip seperti di Eropa, baik tata kota, bangunan, maupun fashion orang-orangnya. Pemandangan yang sedikit eksotis dan paradoks, sebab muslim 98 persen, tapi nampak sangat sedikit perempuan yang berhijab.¹⁷

¹⁵Rinawati Acan Nurali, *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, 7.

¹⁶Utang Ranuwijaya, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)*, Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 3, NO. 1, 2016, 65.

¹⁷<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/12/tunisia-sejarah-dan-pengaruh-revolusi-melati-pada-dunia-arab>

Tunisia mengikuti arah kiblat Eropa mengenai kebudayaan dan tradisi intelektual. bersentuhan langsung dengan Eropa, khususnya Perancis. Tunisia merupakan bekas dari jajahan Perancis, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan Eropa ke Tunisia sangat mudah menyebar. Tokoh Thahir al-Haddad berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan melalui feminisme Eropa di Tunisia. Beberapa tulisannya menggambarkan keinginan dalam membebaskan perempuan muslimah. Kasus perceraian jugamenjadi fokus Thahir Haddad agar bisa ditangani oleh hukum, sehinggalaki-laki tidak berbuat semena-mena dengan perempuan.¹⁸

Pada masa pemerintahan Bourguiba di Tunisia merupakan rezim yang sangat radikal yang mengikuti pola sekularisasi dan pembangunan ala pemimpin Turki saat itu, Kemal Attaturk. Sistem yang menghapuskan segala kepengaruh agama dalam kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan, yaitu; minimalisir pengaruh agama dalam jangkauan sosial-budaya, sehingga tercipta identitas baru yang sesuai dengan modernitas. Lembaga-lembaga keagamaan terkhusus Universitas Zaituna Klasik dipinggirkan, sudah adanya pemisah antara agama dan negara.¹⁹

3. Dampak Modernisasi di Tunisia

Modernisasi menghasilkan dualism, yaitu antara masyarakat desa yang terbelakang dengan masyarakat kota yang sudah maju, hilangnya kebebasan publik, tidak memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan negara selalu membungkam aspirasi masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat dengan mereka.²⁰

Proses modernisasi yang terjadi membuat gaya berbusana di Tunisia mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan zaman. Kemajuan teknologi dan ilmu menjadi penyebab terjadinya perubahan dan perkembangan model pakaian, namun standar syari'at dan kearifan lokal wajib dipertahankan agar fungsi dan tujuan berpakaian tetap terjaga. Dalam Islam semua diatur dengan sempurna, salah satunya dalam berpakaian yang dituntut seseorang bersikap logis dan adil, tidak berlebihan, dan tidak kusut atau berantakan dalam berpakaian.²¹

Tidak hanya di bidang gaya berpakaian mengalami proses modernisasi, bidang arsitek, seni bangunan, dan dekorasi juga berpengaruh pesat. Bukti dari perubahan yang terjadi bisa dinikmati hingga sekarang melalui bangunan-bangunan tua yang sangat identik. Di sisi lain, bidang intelektual banyak tokoh-tokoh yang telah menjadi simbol dari kemajuan peradaban Islam di daerah tersebut, seperti Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Ibn Zuhri, Ibn Rusyd, Ibn Tufayl. Adapun dampak adanya modernisasi di Tunisia sebagai berikut.

Positif

¹⁸<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/21/thahir-al-haddad-bapak-feminisme-tunisia>

¹⁹Sudarman, *SEJARAH DALAM KAJIAN STUDI ISLAM*, 100.

²⁰Sudarman, *SEJARAH DALAM KAJIAN STUDI ISLAM: Analisis terhadap Pemikiran Abu Rabi'*, Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. VII, No. 15, 2018, 100.

²¹Muhammad Haikal, *Ketentuan Pakaian Perempuan Menurut Fikih Dan Qanun Aceh*, Jurnal Ius Civile, Vol. 5, No.2, 2021, 113.

Modernisasi dan reformasi Burguibah di Tunisia memiliki dampak positif baik secara politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada saat itu. Akan tetapi, sekularisasi yang dilakukan Burguibah terkesan melanggar nilai-nilai keagamaan, terkhusus agama Islam. Adapun Tunisia merupakan negara yang memiliki perkembangan moderasi Islam yang luar biasa, hingga saat itu Tunisia dikenal dengan Bumi Maqashid Syariah. Maksudnya, memiliki perkembangan Islam moderat yang tidak dapat dipisahkan, keduanya berkembang pesat di Tunisia yang sudah banyak melahirkan para intelektual muslim besar. Salah satunya adalah Muhammad Thahir bin 'Asyur seorang ahli fikih (1879-1973).²²

Pendidikan dan perbaikan kualitas umat, masa Burguibah saat itu sangat mendorong pembaharuan, salah satunya dalam memerdekakan negaranya. Ia menganjurkan generasi muda muslim berkiprah di berbagai sektor kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Burguibah memiliki pandangan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh negara, sehingga pendidikan diselenggarakan secara gratis. Sejak itu, sekolah menjadi milik publik yang menyelenggarakan pendidikan secara gratis. Bidang pendidikan, Abdul Aziz al-Tsa'alabi sangat mengedepankan akan introspeksi diri sendiri sebelum memperbaiki halayak ramai. Berasaskan al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, al-Tsa'alabi mendorong profesionalisme, yang mana seseorang memiliki keahlian sendiri dalam bidang yang diminati.²³ Burguibah menyuarakan kesetaraan gender, perempuan bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga sudah bisa memilih memakai atau tidak hijab untuk dirinya, dan bebas menentukan calon suami. Tidak hanya itu, perceraian harus berproses di pengadilan negara agar tidak memainkan pernikahan.

Negatif

Burguisme memiliki mazhab dengan "tidak ada satupun dimensi kehidupan manusia yang terlepas dari kekuatan rasional manusia". Seperti Mu'tazilah, Burguisme mengutamakan kekuatan rasional. Burguibah memberi uraian penjelasan atas prinsipnya tersebut bahwa masyarakat muslim di Tunisia harus berhenti berpuasa pada bulan Ramadhan. Mereka dituntut untuk bekerja keras dalam meningkatkan pembangunan dan kualitas negara. Bagi Burguibah Tunisia masih dalam kategori underdevelopment.²⁴ Mazhab Burguisme sudah tak lagi bagi masyarakat Tunisia sekarang, hal tersebut dibuktikan dengan melihat kehidupan masyarakat Tunisia sehari-hari. Ini menjadi penyebab mahasiswa Universitas Zaitunah banyak yang tidak memakai jilbab, dari pihak

²²<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/18/habib-burguibah-dan-sekularisasi-tunisia>

²³<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/23/abdul-aziz-al-tsaalabi-pan-islamisme-dan-barat>

²⁴<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/18/habib-burguibah-dan-sekularisasi-tunisia>

kampus sendiri juga membolehkan mahasiswa yang tidak menggunakan jilbab saat proses pembelajaran.²⁵

Pelarangan menggunakan jilbab saat proses pembelajaran juga terjadi pada tingkatan SMP dan SMA, anggapan itu dikuatkan karena banyak dari siswa ketika keluar sekolah tidak ditemukan yang menggunakan jilbab. Berguubah dengan sekularisasi yang mendarah daging membuat dampak pada masyarakat hingga abad 21 ini. Habib Burguibah bisa disejajarkan dengan Kemal Atturk di Turki atas kesamaannya dalam pemikiran sekularismenya.²⁶ Hal tersebut dibuktikan dengan didirikan pendidikan modern oleh Habib Burguibah dengan mengangkat penulis handal bernama Mahmud Messadi, sebagai menteri pendidikan. Adapun sistem pendidikan yang diusulkan oleh Burguibah adalah dengan menghapuskan pendidikan al-Qur'an dengan menggantikannya dengan kurikulum pendidikan ala Barat hingga 2 kali lipat.

C. Kesimpulan

Memahami perkembangan Tunisia yang penuh dengan dinamika akibat dari dampak Arab Spring. Perjalanan rakyat Tunisia, dalam mencapai kemerdekaan dari pendudukan pemerintah Tunisia sendiri merupakan jalan yang tidak mudah. Tentu saja, ini membutuhkan pengorbanan dalam perjalanan panjang demokrasi di Tunisia. Tunisia berhasil diselenggarakan pemilihan umum untuk para calon pemimpin secara demokratis. Tunisia semakin berkembang karena adanya peresmian konstitusi baru yang berisi tentang dukungan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Tunisia menjadi salah satu negara Arab yang mempelopori feminisme di Timur Tengah. Proses modernisasi di Tunisia memberikan perubahan kearah positif, seperti pendidikan, sosial, politik, dan banyak pembaharuan lainnya. Namun, ada juga kebijakan-kebijakan yang sangat radikal, mengambil perspektif sikap pro-barat dan sekuler. Kebijakan yang memiliki hubungan dengan dimensi keagamaan adalah dengan penghapusan pengadilan agama, menghapus kewajiban memakai jilbab, upaya dalam meninggalkan puasa di bulan Ramadhan agar lebih produktif, dan mengubah hukum syari'ah dengan hukum sipil yang diambil dari Perancis.

Referensi

- Vita Ery Oktaviyani, *Islam Di Afrika Utara*, Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), Vol. 3, No. 1, 2019
- Maryam, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2012

²⁵<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/18/habib-burguibah-dan-sekularisasi-tunisia>

²⁶<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/18/habib-burguibah-dan-sekularisasi-tunisia>

Utang Ranuwijaya, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)*, Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman , Vol. 3, NO. 1, 2016, 65.

Sainul Rahman, Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Kasus Tunisia dan Yaman, Jurnal ICMES Volume 3, No. 1, Juni 2019.

Ayu Maulida Alkholid, Peran Perempuan Tunisia dalam Politik Pasca-Arab Spring Melalui Telaah State Feminism, Jurnal ICMES Volume 5, Nomor 2, Desember 2021.

Rinawati Acan Nurali, *Perkembangan Demokrasi di Tunisia*, PANRITA Journal of Science, Technology, and Arts, Vol. 1, No. 1, 2021, 6.

Muhammad Haikal, *Ketentuan Pakaian Perempuan Menurut Fikih Dan Qanun Aceh*, Jurnal Ius Civile, Vol. 5, No.2, 2021, 113.

Ramdan Wagianto, *Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 2022, 82.

Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, 2014.

Suchamdi, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*, Kodifikasi, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

Sudarman, *SEJARAH DALAM KAJIAN STUDI ISLAM: Analisis terhadap Pemikiran Abu Rabi'*, Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. VII, No. 15, 2018

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/21/thahir-al-haddad-bapak-feminisme-tunisia>

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/23/abdul-aziz-al-tsaalabi-pan-islamisme-dan-barat>

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/18/habib-burguibah-dan-sekularisasi-tunisia>

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/14/gus-dubes-tunisia-zuhairi-misrawi-dan-negeri-lambung-peradaban-islam>

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2022/12/12/tunisia-sejarah-dan-pengaruh-revolusi-melati-pada-dunia-arab>